

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 tentang penghentian kegiatan pada waktu salat Jumat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari aparat Wilayatul Hisbah, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha. Analisis kinerja Wilayatul Hisbah dalam penelitian ini mengacu pada indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, responsivitas, dan responsibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 di Kota Lhokseumawe belum berjalan secara optimal. Dari aspek (produktivitas), pelaksanaan patroli dan pengawasan masih terbatas dan belum konsisten. Dari aspek (responsivitas), Wilayatul Hisbah telah melakukan upaya peneguran dan imbauan terhadap pelanggaran, namun belum sepenuhnya mampu merespons dinamika sosial di lapangan secara efektif. Sementara itu, dari aspek (responsibilitas), pelaksanaan tugas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun penindakan yang cenderung bersifat persuasif menyebabkan pelanggaran masih terus terjadi. Faktor-faktor yang memengaruhi masih ditemukannya aktivitas masyarakat pada waktu salat Jumat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan konsistensi pengawasan, penguatan sosialisasi, serta penegakan aturan yang lebih tegas agar pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan penerapan syariat Islam di Aceh.

Kata kunci: *Kinerja, Wilayatul Hisbah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Salat Jumat, Lhokseumawe.*

ABSTRACT

This study aims to examine the performance of Wilayatul Hisbah in enforcing Article 8 of Qanun Aceh Number 11 of 2002 concerning the cessation of activities during Friday prayer in Lhokseumawe City. The research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants consisting of Wilayatul Hisbah officers, community leaders, and business actors. The analysis of Wilayatul Hisbah's performance in this study refers to the indicators of public organization performance proposed by Agus Dwiyanto, namely productivity, responsiveness, and responsibility. The results of the study indicate that the performance of Wilayatul Hisbah in enforcing Article 8 of Qanun Aceh Number 11 of 2002 in Lhokseumawe City has not been optimal. From the aspect of productivity, patrol and supervision activities remain limited and inconsistent. From the aspect of responsiveness, Wilayatul Hisbah has made efforts in the form of warnings and appeals against violations; however, it has not been fully able to respond effectively to social dynamics in the field. Meanwhile, from the aspect of responsibility, the implementation of duties has been in accordance with applicable procedures, yet the predominantly persuasive approach in enforcement has resulted in continued violations. Factors contributing to the persistence of community activities during Friday prayer include low public awareness, lack of socialization, as well as limited resources and supervision. Therefore, it is necessary to enhance the consistency of supervision, strengthen socialization, and implement firmer law enforcement so that the implementation of Qanun Aceh Number 11 of 2002 can run more effectively and in line with the objectives of Islamic law enforcement in Aceh.

Keywords: *Performance, Wilayatul Hisbah, Qanun Aceh Number 11 of 2002, Friday Prayer, Lhokseumawe.*